

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pada 12 Juni 2018, Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dan Pemimpin Amerika Serikat, Donald Trump, melakukan pertemuan di Pulau Santosa, Singapura. Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama antara pemimpin Korea Utara dan Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat mengalami ketegangan akibat uji coba nuklir Korea Utara. Presiden Trump mengungkapkan bahwa semua pembicaraan berlangsung jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Kim Jong Un juga menyatakan bahwa Korea Utara dan Amerika Serikat memutuskan untuk melupakan masa lalu.<sup>1</sup> Hasil dari pembicaraan ini tentunya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan nuklir Korea Utara karena membicarakan persoalan denuklirisasi secara penuh di Semenanjung Korea.

Berbicara mengenai nuklir Korea Utara, Amerika Serikat merupakan pihak yang gigih dalam menciptakan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Padahal, Amerika Serikat sendiri bukanlah negara Asia Timur yang akan langsung terancam oleh pengembangan nuklir Korea Utara. Amerika Serikat berada cukup jauh dari letak Asia Timur yang berada di 26°LU-48LU° dan 67°BB-125°BB. Hal ini membuat keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur sebenarnya akan menimbulkan biaya dan upaya yang tidak sedikit seperti pelatihan gabungan, pemasangan THAAD, dan pengiriman armada perang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> BBC News Indonesia. Kim-Trump tandatangi 'kesepakatan' : Hubungan AS-Korut akan berbeda sama sekali. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/amp/dunia-44447915> pada januari 2019

<sup>2</sup> Fransminggi Kamasa. *Perang Korea*. Pustaka Narasi .2014. Hlm 73

Selain itu, jumlah nuklir Amerika Serikat telah mencapai 6.185 total inventaris.<sup>3</sup> Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan nuklir milik Korea Utara yang hanya diperkirakan berjumlah 20-30 total inventaris.<sup>4</sup> Perbandingan ini menunjukkan bahwa kemampuan nuklir Korea Utara bukanlah ancaman yang serius bagi Amerika Serikat. Namun, tak bisa dihindari fakta bahwa kesepakatan aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan yang telah berlangsung selama puluhan tahun membuat Amerika Serikat terus mengambil tindakan dalam stabilitas keamanan Semenanjung Korea.

Hal tersebut dikarenakan dalam kesepakatan dinyatakan bahwa kedua negara akan saling melindungi jika ada ancaman dari pihak ketiga. Disini, Amerika Serikat berupaya untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman nuklir Korea Utara. Namun, Korea Selatan dan Amerika Serikat sendiri memiliki pandangan yang berbeda terkait pendekatan untuk menanggapi Korea Utara. Terlepas dari hambatan tersebut yang menjadi keunikan dalam hal ini ialah Amerika Serikat terus terlibat dalam proses Denuklirisasi Korea Utara yang diklaim sebagai upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.

Keterlibatan Amerika Serikat bukan hanya dalam hal mendukung perdamaian Semenanjung Korea, tetapi juga pengambilan tindakan yang kontradiktif dengan tujuan perdamaian. Terkadang, tindakan yang diambil Amerika Serikat justru membuat denuklirisasi semakin jauh untuk dicapai. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari upaya diplomasi multilateral *Six Party Talks*, keberadaan pasukan militer AS di Korsel dan Jepang yang berpengaruh dengan dinamika politik dan keamanan di Asia Timur terutama pada masa Pemerintahan Presiden

---

<sup>3</sup> SIPRI. "Armaments, Disarmament and International Security". 2019 : hlm. 11

<sup>4</sup> SIPRI. hlm. 11

Barack Obama, serta pembuatan Pengoperasian sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Semenanjung Korea.<sup>5</sup>

Kembali lagi pada Agustus 2003, *Six Party Talks* dibentuk sebagai serangkaian upaya perundingan untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara. Upaya multilateral ini berupaya menggandeng Korea Utara bergabung ke dalam meja perundingan melalui proses negosiasi yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.<sup>6</sup> Perundingan pertama *Six Party Talks* yang dimulai pada 27 Agustus 2003 di Beijing membahas mengenai normalisasi hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat serta normalisasi hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan. Namun perundingan ini tidak memberikan dampak yang baik. Sebaliknya, Amerika Serikat justru memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara.

Kemudian, sejak dikeluarkannya kesepakatan *Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula* pada 1992, muncul beberapa fenomena yang membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan semakin memburuk karena kesepakatan tersebut tidak terealisasi dengan baik. Pada tahun 2009, Korea Utara secara terang-terangan melakukan uji coba rudal balistik di sekitar laut Jepang. Hal ini membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang sebelumnya membaik malah berbalik menjadi buruk. Peran Amerika Serikat pada tahap ini ialah mendorong terbentuknya *United Nations Security Council*

---

<sup>5</sup> Mega Aldikawati. "Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur Pasca Perang Dingin" *Reunifikasi Korea*, 2012: 45

<sup>6</sup> Muhammad Nabil. "Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009." *Jurnal Ilmu Hubungan internasional*, 2014: 3.

*Resolution* (UNSCR) pada tahun 2009 terkait keamanan Asia Timur, yaitu Resolusi 1887 dan Resolusi 1874.<sup>7</sup>

Kemudian, saat Kim Jong-un dilantik sebagai pemimpin Korea Utara pada tahun 2011, Korea Utara lebih provokatif dibandingkan pemerintah sebelumnya. Pada pertengahan 2011, Pemerintahan Obama mengumumkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan fokus ke Asia dengan slogan "*Pivot to Asia*".<sup>8</sup> Dalam kebijakan ini juga termasuk didalamnya aliansi militer bersama Korea Selatan dan Jepang sebagai basis pertahanan Asia, khususnya untuk mengatasi ancaman Korea Utara.

Kerjasama dan aliansi keamanan dengan Korea Selatan untuk memperkuat keamanan domestik Korea Selatan dari ancaman keamanan kawasan, dilakukan dengan transfer teknologi persenjataan dan penempatan pasukan militer di Korea Selatan. Hal ini merupakan bentuk implementasi kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (*Mutual Defense Treaty*). Jumlah pasukan militer Amerika Serikat di Korea Selatan hampir mencapai 35.000 pasukan pada tahun 2016.<sup>9</sup> Amerika Serikat juga telah mendesak Korea Selatan untuk mengembangkan atau memperoleh kemampuan BMD (*Ballistic Missile Defense*) yang canggih dan mengintegrasikannya dengan sistem BMD Amerika Serikat dan sekutu di wilayah ini. Hal ini dinamakan *Terminal High Area Defense* (THAAD) sebagai upaya pertahanan rudal balistik.

---

<sup>7</sup> Edward Giovanny Marpaung. "Aliansi Militer Amerika Serikat Dan Korea Selatan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea (2010-2016)". Universitas komputer Indonesia. 2017: hlm. 4

<sup>8</sup> Mega Aldikawati. Hlm. 52

<sup>9</sup> Edward Giovanny Marpaung. hlm. 8

Selain itu, Amerika Serikat dengan Jepang juga saling bersepakat dalam perjanjian keamanan dan aliansi bersama. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan justru semakin menjadi ancaman bagi negara non-aliansi Amerika Serikat termasuk Korea Utara, intervensi Amerika Serikat di kawasan dipandang sebagai upaya untuk mengancam keamanan nasionalnya.<sup>10</sup> Dibawah pemerintahan Obama, Amerika Serikat pun menerapkan strategi '*Strategic Patience*' untuk menanggapi permasalahan Korea Utara, yang mana kebijakan ini mengupayakan adanya negosiasi dengan Korea Utara terkait denuklirisasi dengan cara '*Wait*' dan pemberian tekanan terhadap Korea Utara.<sup>11</sup>

Namun, pada awal tahun 2017 Presiden Donald Trump melalui deklarasi Wakil Presiden, Mike Pence menyatakan bahwa kebijakan keamanan Amerika Serikat '*Strategic Patience*' telah berakhir. Amerika Serikat berada dalam kondisi dilematis. Intervensi militer yang digencarkan terhadap Korea Utara pasti akan menyebabkan kerugian luar biasa tidak hanya bagi kedua negara tetapi juga negara lain di kawasan, bahkan serangan militer bisa memicu terjadinya perang nuklir global.

Sebelum melakukan pertemuan bilateral dengan Kim Jong Un, Donald Trump juga mendukung pertemuan bilateral antara Korea Utara dan Korea Selatan pada 27 April 2018. Setelah pertemuan bilateral Korea Utara-Korea Selatan, Presiden Trump merencanakan pertemuan dengan Kim Jong-un yang akan melakukan pembahasan nuklir. Pertemuan tersebut diharapkan mampu menghasilkan komitmen untuk melakukan denuklirisasi dan menanggukhan uji

---

<sup>10</sup> M. Najeri Al Syahrin. "Logika Dilema Keamanan Asia Timur Dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara." Hlm 125

<sup>11</sup> Krisandhy Ertanto Rantung. "Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara pada Masa Pemerintahan Barack Obama". 2016 : hlm. 5

coba rudal Korea Utara. Dengan terus aktifnya Amerika Serikat dalam upaya denuklirisasi Korea Utara, penting untuk mengetahui lebih lanjut kepentingan yang hendak dipenuhi Amerika Serikat dalam upaya ini.

### **1.2 Rumusan Masalah**

KTT Singapura 2018 merupakan pertemuan antara kedua pemimpin negara yaitu Amerika Serikat dan Korea Utara. Pertemuan ini membahas mengenai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Jika membahas mengenai isu nuklir Korea Utara, maka dapat dilihat bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang selalu mengupayakan adanya denuklirisasi, baik secara diplomatik, maupun koersif seakan-akan terancam dengan adanya pengembangan nuklir Korea Utara. Padahal Amerika Serikat memiliki kapabilitas nuklir yang jauh lebih mumpuni dibandingkan nuklir Korea Utara. Selain itu, Amerika Serikat juga bukan negara kawasan Asia Timur yang akan terpengaruh langsung oleh nuklir Korea Utara.

Tentu saja, Amerika Serikat mengklaim bahwa upayanya dalam mewujudkan denuklirisasi didukung oleh *Mutual Defense Treaty* dengan Korea Selatan. Namun, Amerika Serikat dan Korea Selatan sendiri terkadang memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi Korea Utara.<sup>12</sup> Terlepas dari hal tersebut, Amerika Serikat tetap berusaha mewujudkan stabilitas keamanan Semenanjung Korea dengan cara terus mengupayakan denuklirisasi Korea Utara.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, penulis menarik pertanyaan penelitian “Apa kepentingan Amerika Serikat dalam proses Denuklirisasi Korea Utara?”

---

<sup>12</sup> Edward Giovanni Marpaung. Aliansi Militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Semenanjung Korea (2010-2016). Hlm 8

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kepentingan Amerika Serikat dalam proses Denuklirisasi Korea Utara.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan juga tentunya akan memiliki beberapa manfaat baik secara akademis maupun praktis. Untuk manfaat akademis sendiri, penelitian ini dapat membantu pembaca untuk memahami konsep kepentingan dari fenomena hubungan internasional yang terjadi, yaitu keterlibatan Amerika Serikat dalam denuklirisasi Korea Utara secara lebih dalam. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat secara praktis untuk menjadi referensi bagi khalayak maupun pengamat yang berfokus dalam respon terhadap fenomena atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara.

#### **1.6 Studi Pustaka**

Penulis akan menggunakan tulisan Nicholas D. Anderson yang berjudul “Explaining North Korea’s Nuclear Ambitions : Power and position on the Korean Peninsula” untuk menjadi tinjauan pustaka. Hal yang menjadi permasalahan dalam tulisan Anderson ialah Korea Utara yang secara besar-besaran menguji coba senjata nuklirnya pada tahun 2016 ke Semenanjung Korea. Tindakan Korea tersebut dikecam oleh banyak pihak, khususnya Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Dari uji coba tersebut, Anderson berfokus untuk mengetahui motif Korea Utara dalam mengembangkan dan menguji coba senjata nuklirnya.

Anderson menjelaskan bahwa terdapat dua argumen dasar mengenai motif Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Argumen pertama yaitu 'doves' yang mengungkapkan bahwa terancamnya Korea Utara dari segi militer, politik, dan ekonomi membuat Korea Utara tetap bersikukuh untuk mempertahankan pengembangan senjata nuklirnya.<sup>13</sup> Singkatnya, argumen pertama ini melihat bahwa aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan yang bekerjasama terutama di bidang militer, membuat Korea Utara merasa terancam. Hal tersebut dikarenakan Korea Utara merupakan 'musuh' dari Korea selatan dalam konflik Semenanjung Korea. Selain itu, baik Korea Selatan maupun Amerika Serikat juga memiliki ideologi yang bertolak belakang dengan Korea Utara.

Berbeda dengan argumen pertama, argumen 'Hawks' cenderung menitikberatkan bahwa psikologis, insentif politik domestik, dan motif revisionis merupakan pendorong utama bagi pengembangan senjata nuklir negara tersebut.<sup>14</sup> Argumen ini berkaitan dengan ideologi *Juche* yang dianut oleh Korea Utara. Ideologi ini menyatakan bahwa yang menentukan takdir dari suatu negara ialah negara itu sendiri. Temuan dari tulisan Anderson membantu penulis dalam menjelaskan motif Korea Utara dalam mengembangkan nuklir senjata nuklir. Hal tersebut tentu akan berkaitan dengan tujuan penulis yaitu untuk menjelaskan kepentingan Amerika Serikat dalam proses denuklirisasi Korea Utara.

Selanjutnya, penulis juga mengambil tulisan "North Korea's Revolutionary Unification Policy" karya Sung-Yoon Lee. Tulisan ini diawali dengan pembahasan mengenai Revolusi dari Korea Selatan dari sejak terjadinya Perang Korea.

---

<sup>13</sup> Nicholas D Anderson. "Explaining North Korea's Nuclear Ambitions : Power and Position on the Korean Peninsula." *Australian Journal of International Affairs* , 2017 : hlm. 2

<sup>14</sup> Nicholas D Anderson. hlm. 5



Selanjutnya dibahas pula mengenai Korea Utara yang cenderung agresif sehingga tindakan *underestimating* terhadap negara tersebut akan berbahaya. Lee sendiri berfokus untuk menjelaskan cara Korea Utara untuk mencapai reunifikasi. Dalam tulisannya, Lee menjelaskan bahwa senjata nuklir merupakan cara Korea Utara dalam menanggapi kasus reunifikasi secara revolusioner.<sup>15</sup>

Tulisan Lee memperlihatkan bagaimana Korea Utara bertindak dalam merespon isu reunifikasi dengan Korea Selatan. Lee menjelaskan bahwa nuklir yang dikembangkan Korea Utara digunakan untuk menunjukan bahwa Korea Utara bukanlah negara lemah. Temuan ini berguna untuk membantu penulis dalam menjelaskan Korea Utara sebagai negara yang cenderung ingin mengubah atau merevisi posisinya di sistem internasional sebagai negara yang lemah. Hal ini juga akan berhubungan dengan tindakan yang diambil Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya di Asia Timur.

Selanjutnya, penulis juga memakai tulisan karya Poltak Partogi Nainggolan dalam Jurnal *Politica* yang berjudul “Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik”. Tulisan ini membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat di Asia Pasifik khususnya pada saat pemerintahan Presiden Obama. Nainggolan menjelaskan bahwa pengiriman pasukan ke negara-negara aliansi Amerika Serikat seperti Australia merupakan salah satu tindakan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya di Asia Pasifik.<sup>16</sup>

Nainggolan menemukan bahwa kepentingan Amerika di Asia Pasifik tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan sumber daya alam. Selain itu, kepentingan

---

<sup>15</sup> Lee, Sung Yoon. "North Korea's Revolutionary Unification Policy." *Interational Journal of Korean Studies* XVIII (2014): hlm. 131

<sup>16</sup> Poltak Partogi Nainggolan. "Kepentingan Strategis Amerika Serikat di Asia Pasifik." *Politica* 4 (2013). Hlm. 98

lainnya ialah untuk mengimbangi dominasi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan Tiongkok telah bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru serta terus berupaya untuk meningkatkan anggaran belanja pertahanan negaranya. Tindakan Amerika Serikat dalam pengiriman pasukan di Pangkalan militer negara-negara Asia Pasifik dinilai Nainggolan sebagai cara untuk mengawasi Tiongkok. Dari temuan ini dijelaskan mengenai kepentingan Amerika Serikat di kawasan. Hanya saja, Nainggolan memiliki fokus kawasan yang lebih besar daripada penulis yaitu Asia Pasifik. Sedangkan, dalam tulisan ini penulis lebih berfokus terhadap kepentingan Amerika di Asia Timur, khususnya dalam isu denuklirisasi Korea Utara.

Studi pustaka pada penelitian kali ini juga akan memakai tulisan Xenia Dormandy dan Rory Kinane, yaitu "*Asia-Pacific Security A Changing Role for the United States*". Tulisan ini menjelaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat terkait keamanan regional Asia Pasifik merupakan tantangan dan keinginan untuk mempromosikan hubungan persahabatan di kawasan Asia Pasifik. Namun, tulisan Dormandy dan Kinane ini merujuk kepada kondisi negara Asia Pasifik secara keseluruhan.

Berbeda dengan tulisan Dormandy dan Kinane, penulis memfokuskan pada kepentingan yang menjadi penyebab Amerika mengeluarkan kebijakan terhadap Asia Timur, khususnya dalam keterlibatannya dalam upaya denuklirisasi Semenanjung Korea. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari upaya diplomasi multilateral *Six Party Talks*, keberadaan pasukan militer Amerika Serikat di Korsel dan Jepang yang berpengaruh dengan dinamika politik dan keamanan di Asia Timur terutama pada masa Pemerintahan Presiden Barack Obama, serta pembuatan

Pengoperasian sistem pertahanan rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Semenanjung Korea. Dalam pembahasan kepentingan, penulis perlu meninjau kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat secara lebih mendalam. Oleh karena itu, tulisan "*Asia-Pacific Security A Changing Role for the United States*" dijadikan salah satu acuan kepustakaan<sup>17</sup>.

M. Najeri Al Syahrin pada tulisannya yang berjudul "Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara" mengkaji tentang rasionalitas pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara yang dikaitkan dengan dilema keamanan di Asia Timur. Pembahasan meliputi deskripsi tentang reaksi dari *security dilemma* yang menciptakan dinamika *arm races* yang mengancam stabilitas keamanan kawasan. Dilema keamanan bagi Korea Utara ditandai dengan polaritas kekuatan, faktor historis dan konstruksi sosial *amity* dan *enmity*. Melalui metode studi kepustakaan, konsep teoritis *security dilemma* dijadikan landasan utama dalam memahami pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Artikel ini menyimpulkan bahwa dilema keamanan di kawasan Asia Timur bersumber pada rasa takut dan ancaman akibat peningkatan kekuatan dan kapabilitas militer negara-negara lain di kawasan.

Tulisan Syahrin dibutuhkan untuk melihat kondisi sebenarnya yang terjadi di kawasan Asia Timur yang cenderung diwarnai ketegangan, sehingga Korea Utara bahkan mengembangkan Senjata nuklir di negaranya. Dengan membahas temuan yang didapat dari tulisan Syahrin, penulis berharap pembaca juga dapat memahami keadaan yang ada di Kawasan Semenanjung Korea. Keadaan tersebutlah yang akan

---

<sup>17</sup> Rory Kinane dan Xenia Dormandy. *Asia-Pacific Security A Changing Role for the United States*. Chatham House report, London: The Royal Institute of International Affairs, Chatham House, 2014 : hlm. 44

mengantarkan keterlibatan Amerika Serikat dalam fenomena yang terjadi di Asia Timur<sup>18</sup>.

Secara keseluruhan, tulisan-tulisan yang dijadikan untuk referensi studi kepustakaan memiliki topik dan temuan yang berbeda-beda. Temuan tersebut dapat membantu penulis dalam menjelaskan kondisi di Asia Timur, khususnya kawasan Semenanjung Korea dan upaya pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara. Tulisan-tulisan tersebut juga dapat membantu menjelaskan keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur. Dengan hal ini, penulis juga akan mengetahui kepentingan yang hendak dicapai negara adikuasa tersebut dalam proses denuklirisasi di Semenanjung Korea.

## **1.7 Kerangka Konsep**

### **1.7.1 Status Quo vs Revisionist State**

*Neoclassical-Realism* merupakan perspektif yang menggabungkan teori realis klasik dan teori neo realis. Perspektif ini menjelaskan bahwa tindakan negara dapat dijelaskan dengan variabel sistemik (penyebaran kekuasaan di beberapa negara), variabel kognitif (persepsi terkait ancaman), dan variabel domestik (lembaga negara atau tokoh masyarakat) yang mempengaruhi kekuasaan. Perspektif ini mengakui mengenai *Balance of power* ala neorealis tetapi perspektif ini melihat bahwa jika pemimpin suatu negara gagal melakukan penyeimbangan, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan sistem internasional.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Najeri Al Syahrin. "Logika Dilema Keamanan Asia Timur Dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara." *Journal of International Studies*, 2018: 117.

<sup>19</sup> Chase O. Davidson. "Neoclassical Realism and The Colapse of the 1994 Agreed Framework". Iowa State University. 2008 : hlm. 76

Dalam perspektif ini dikenal karakteristik negara yang terbagi atas *Status Quo State* dan *Revisionist State*. A.F.K. Organski dan Jacek Kugler menyatakan bahwa negara status quo sebagai pihak yang telah berpartisipasi dalam merancang ‘aturan main’ dan menerima manfaat dari aturan ini. Sedangkan negara revisionis menginginkan tempat baru untuk diri mereka sendiri dalam masyarakat internasional. Negara-negara Revisionis menyatakan ‘ketidakpuasan umum’ terhadap posisi mereka dalam sistem sehingga mereka memiliki keinginan untuk menyusun kembali aturan yang digunakan dalam hubungan antar negara. Indikator yang paling jelas dalam mengidentifikasi negara revisionis ialah sudut pandang para pemimpin negara tersebut. Menurut Randall Schweller, negara revisionis menghargai apa yang mereka miliki saat ini, tetapi menginginkan lebih dari apa yang mereka miliki saat ini. Mereka akan cenderung menggunakan kekuatan militer untuk mengubah status quo.<sup>20</sup>

Kekuatan revisionis digambarkan sebagai negara yang sangat peduli terhadap prestise di atas semua pertimbangan, dan berusaha merombak sistem dan ketertiban internasional untuk keuntungannya sendiri.<sup>21</sup> Ketidakpuasan memotivasi mereka untuk tidak memedulikan kekuatan dominan dan sekutu-sekutunya, sehingga negara revisionis cenderung mengabaikan kekuatan dominan dan lebih berfokus untuk membuat sistem berubah. Ketika kekuatan status quo lebih kuat dibandingkan negara revisionis, maka status sistem akan tetap stabil. Namun, jika

---

<sup>20</sup> Alastair lain Johnston. *International Security* : “Is China a Status quo Power?”. Vol 27. No.4. Harvard College dan MIT Press. Spring 2003 :

<sup>21</sup> Katherine Combes. *POLIS Journal* : “Between Revisionism and Status Quo : China in International Regimes: Chine’s Behaviour in the Global Trade, Non Proliferation and Environmental Regimes”. Vol. 6.University of Leeds. 2012 : 5

kekuatan revisionis lebih kuat daripada pembela status quo, maka sistem pada akhirnya akan berubah.

Jika dilihat dari sistem internasional yang ada pada saat ini kita melihat bahwa kekuatan dominan dipegang oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara itu, Korea Utara hanyalah negara yang memiliki power yang berada di bawah negara-negara dominan. Korea Utara merasa tidak puas dengan posisinya di sistem karena dengan posisi yang lemah membuat Korea Utara lebih mudah terancam terutama dalam bidang keamanan. Oleh karena itu, Korea Utara ingin merubah sistem internasional yang telah ada dengan melakukan Pengembangan Nuklir di negaranya. Korea Utara menunjukkan kepada dunia bahwa mereka juga memiliki senjata militer yang serius. Dari hal tersebutlah dapat dilihat bahwa Korea Utara berusaha menjadi *Revisionist State*.

### 1.7.2 *Range of State Interest*

*Balance of interest* merupakan konsep dari Neorealisme klasik yang berupaya merevisi konsep *balance of power* dan *balance of threat*. Konsep ini dapat bermakna ganda yaitu mencakup kepentingan negara di level unit maupun level sistemik.<sup>22</sup> Untuk menjelaskan konsep ini, Randall L. Schweller menegaskan adanya '*range*' yang bisa menjelaskan posisi dan kepentingan suatu negara. *Range* ini diisi oleh negara yang mempertahankan status quo dan negara yang ingin perubahan atau revisi terhadap sistem. *Range of State Interest* dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Range of State Interest**

---

<sup>22</sup> Randall L. Schweller. "Bandwagoning for Profit : Bringing the Revisionist State Back In". Hlm. 99

	Negara yang puas dengan (status quo)		Negara yang tidak puas (Revisionis)	
	<i>Lion</i>	<i>Lamb</i>	<i>Jackal</i>	<i>Wolves</i>
Kepentingan	<i>Self-Preservation</i>	<i>Self-abnegation</i>	Tujuan yang terbatas	Tujuan yang tidak terbatas
Tindakan	<i>Balancing</i> atau <i>Buckpassing</i>	<i>Appeasement</i> <i>and wave-of-the-future</i> <i>bandwagoning;</i> <i>distancing</i>	<i>Jackal</i> <i>Bandwagoning</i>	Resiko agresi

Sumber Range Of State Interest<sup>23</sup>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa *Lions* merupakan negara yang akan membayar tinggi untuk melindungi apa yang mereka miliki. Sebagai pihak yang puas, negara ini akan mempertahankan kondisi yang telah ada (*status quo*). Oleh karena itu, negara *Lions* cenderung melakukan tindakan *balancing* atau *buckpassing* untuk mempertahankan posisi dan memaksimalkan keamanan mereka.<sup>24</sup> *Balancing* merupakan tindakan penyeimbangan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang berpotensi menciptakan ancaman agresi. Sedangkan, *Buck passing* merupakan strategi suatu negara untuk mencegah

<sup>23</sup> Randall L. Schweller. "Neorealism's Status Quo Bias : What Security Dilemma? ." *Security Studies* (Ohio State university), 1996: hlm. 99

<sup>24</sup> Randall L. Schweller. hlm. 99

agressor dengan memanfaatkan negara lain sementara negara ini tetap mematuhi pedoman.<sup>25</sup>

Sedangkan, *lamb* merupakan negara yang akan membayar rendah untuk pertahanan dan perluasan nilai mereka. Dalam sistem internasional, negara tipe ini merupakan negara yang memiliki kapabilitas lemah, baik dari segi politik, ekonomi, maupun pertahanan. Oleh karena itu, untuk menjaga dirinya tetap aman, negara ini hanya bertujuan untuk *Self-abnegation*.<sup>26</sup>

Ketika suatu negara tidak bisa mengikuti dinamika keseimbangan atas polaritas kekuatan yang ada dalam sistem, maka negara tersebut rentan menjadi sasaran dominasi dan ekspansi negara lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak puas dengan sistem internasional yang ada ialah negara-negara yang berada dalam *range jackal* dan *wolves*. *Jackal* merupakan negara yang akan membayar tinggi untuk mempertahankan apa yang mereka miliki, tetapi mereka juga akan biaya yang lebih besar lagi untuk memperluas nilai-nilai yang mereka miliki.<sup>27</sup> Namun, negara dalam *range* ini cenderung tidak ingin mengambil resiko sehingga negara ini lebih sering mengikuti *lion* (negara pemimpin status quo) yang memiliki kekuatan besar. Oleh karena itu, negara dengan *range Jackal* sering memilih tindakan *bandwagoning*.

Walaupun *Jackal* dan *wolves* merupakan pihak yang tidak puas terhadap status quo, tetapi *wolves* merupakan pihak yang lebih ambisius untuk mencapai apa yang mereka idamkan. Oleh karena itu, negara dalam *range* ini cenderung bersedia mengambil resiko besar untuk memperbaiki kondisi mereka yang mereka anggap

---

<sup>25</sup> Jhon Mearshimer. "The Tragedy of Great Power Politics". New York: W. Warton Company. Hlm. 157-158

<sup>26</sup> Randall L. Schweller.: "Bandwagoning for Profit : Bringing the State Back in". *International Security* . Vol. 19. No. 1. The MIT Press. 1994 : 101-102.

<sup>27</sup> Randall L. Schweller. "Bandwagoning for Profit : Bringing the State Back in". Hlm. 103.



tidak dapat ditoleransi lagi. Tanpa rasa takut akan kehilangan, pihak ini akan berusaha mengejar ekspansi sembrono.<sup>28</sup>

Dalam sistem internasional, kita dapat melihat bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang sudah memiliki kekuatan besar. Sementara itu, Korea Utara merupakan negara yang berupaya untuk mengubah keadaan negaranya dalam sistem internasional. Pada penelitian ini penulis akan mengkategorikan Amerika Serikat sebagai *lion*. Sedangkan Korea Utara merupakan negara yang sedang menuju *range wolves*. Hal tersebut dikarenakan Korea Utara berusaha untuk berani untuk mengambil resiko untuk membuat negaranya diakui mempunyai posisi yang diperhitungkan di sistem internasional.

Dalam menganalisa Amerika Serikat, peneliti akan berfokus pada *range Lion*, yang mana negara dalam *range* ini memiliki tujuan primer untuk *Self Preservation*. Tujuan *Self Preservation* berarti negara berupaya untuk maksimalisasi keamanan (*Security Maximizer*) dan mempertahankan posisi (*maintain position*). Untuk mencapai maksimalisasi keamanan maka kepentingan yang harus dicapai ialah sebagai berikut :

1. Mempertahankan identitas independen

Setiap negara memiliki identitas masing-masing yang akan dipertahankan.

Negara *Lion* sendiri biasanya memiliki identitas sebagai pemenang perang atau negara pemilik ekonomi dan keamanan yang terkuat. Identitas inilah yang akan dipertahankan oleh negara *Lion*.

---

<sup>28</sup> Randall L. Schweller. "Bandwagoning for Profit : Bringing the State Back in". Hlm. 103-104.

2. Mempertahankan perdagangan positif<sup>29</sup>

Dalam memaksimalkan keamanannya, setiap negara juga perlu memperhatikan bidang ekonomi. Perhatian tersebut biasanya meliputi penguatan ekonomi domestik dan kegiatan ekspor-impor dengan negara lain.

3. Meningkatkan integritas fungsional<sup>30</sup>

Negara harus bisa mengintegrasikan kepentingan yang ingin dicapai oleh unit-unit dalam domestiknya. Selain itu, negara juga perlu mempertimbangkan tekanan sistem internasional.

Sedangkan untuk mempertahankan posisi, maka negara ini harus mencapai kepentingan sebagai berikut :

1. Mempertahankan aliansi

Dalam mempertahankan posisi dalam sistem, suatu negara juga perlu mempertahankan aliansinya yang bisa memberikan keuntungan untuk negara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan prestise negara *lion* sebagai negara pelindung, terutama bagi aliansinya..

2. Mempertahankan prestise

Dengan menduduki posisi paling atas dalam sistem, maka negara *lion* akan mempertahankan posisi dirinya sebagai penjaga ketertiban dunia. Negara ini tentunya memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap aliansinya dari ancaman pihak lain.

---

<sup>29</sup> Randall L. Schweller. "New Realist Research on Alliance : Refining, not Refuting, Walt's Balancing Proposition". *American Political Science Review* . Vol 91 : 4. 1997 : hlm.928

<sup>30</sup> Randall L. Schweller. "Neorealism's Status Quo Bias : What Security Dilemma?". Hlm. 102

### 3. Mencegah agresi (*Frightened the Wolves*)<sup>31</sup>

Sebagai pengelola sistem, negara *lion* akan menekan pihak manapun yang berpotensi untuk mengacaukan sistem yang telah didominasinya selama ini.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, serta untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif maupun induktif.

### 1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada periode 2009-2018. Hal ini dikarenakan peneliti berangkat dari adanya laporan fasilitas dan materi nuklir yang dimiliki Korea Utara pada Mei 2009<sup>32</sup> serta pada 14 April 2009, Korea Utara menyatakan pengunduran dirinya dari forum Six Party Talks.<sup>33</sup> Sedangkan, Donald Trump dan Kim Jong Un mengupayakan pembicaraan denuklirisasi secara bilateral pada tahun 2018. Untuk jangkauan masalah, penelitian ini hanya terbatas pada kepentingan Amerika Serikat dalam proses denuklirisasi Korea Utara dalam kurun waktu 2009-2018.

---

<sup>31</sup> Randall L. Schweller. "Bandwagoning for Profit : Bringing the Revisionist State Back In". Hlm. 101

<sup>32</sup> Muhammad Nabil. "Diplomasi Multilateral Six Party Talks Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara Periode 2003-2009.". Hlm 53

<sup>33</sup> Muhammad Nabil. Hlm 53

### **1.8.3 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis**

Peneliti memilih Amerika Serikat sebagai unit analisis karena peneliti akan mencoba menjelaskan kepentingan dari Amerika Serikat dalam keterlibatannya di konflik Semenanjung Korea Utara. Untuk unit eksplanasi yang mempengaruhi perilaku Amerika Serikat adalah nuklir Korea Utara dan hubungan Korea Utara dengan negara-negara di Asia Timur, karena negara-negara tersebut terlibat dalam konflik sehingga Amerika Serikat turun tangan. Kemudian, untuk tingkat analisis, peneliti memilih untuk berada pada level sistem internasional karena peneliti akan terfokus pada kepentingan Amerika Serikat dalam sistem internasional melalui tindakan yang dilakukan untuk merespon nuklir Korea Utara.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan pengumpulan data dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian. Metode ini terfokus kepada informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis sendiri ialah Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan telaah terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, media massa yaitu mengakses situs-situs internet. Dengan demikian, data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder.

Selain dokumen yang telah didapatkan, peneliti berencana untuk mengumpulkan literatur yang dapat mendukung penelitian ini. Peneliti juga menggunakan media internet untuk mencari informasi dan data-data yang

diperlukan dengan kata kunci pencarian *Kepentingan nasional, Kebijakan Amerika Serikat, dan Denuklirisasi Korea Utara*. Untuk situs internet yang akan dikunjungi, peneliti berencana untuk mengunjungi situs kementerian luar negeri Amerika Serikat, dokumern *National Security Strategy* Amerika Serikat, web resmi PBB, dan beberapa situs terpercaya lainnya yang data dan informasinya dapat mendukung mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam proses Reunifikasi Korea.

### **1.8.5 Teknik Analisis Data Penelitian**

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut<sup>34</sup>:

#### **1. Reduksi Data**

Data-data yang telah disusun secara sistematis akan di reduksi, atau diabstraksikan secara terperinci. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Peneliti akan memfokuskan beberapa data yang terkumpul dalam suatu sub bahasan. Bab II hanya akan berisi data mengenai nuklir Korea Utara dan dinamika hubungan negara-negara Asia Timur dengan Korea Utara. Data-data mengenai tindakan Amerika Serikat akan dipilah dan dikumpulkan dalam bab III. Begitu pula pada bab IV, hanya akan berisi data-data pilahan yang mendukung kepentingan Amerika Serikat dalam proses denuklirisasi Korea Utara.

#### **2. Penyajian Data**

Data yang telah dirincikan dibatasi dengan batasan yang jelas. Data tersebut disajikan secara sistematis. Penyajian data juga diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel. Misalnya, dari grafik yang

---

<sup>34</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012: 247

menjelaskan kemampuan nuklir Amerika Serikat dari rentang waktu 2009-2018 cenderung meningkat, grafik mengenai kemampuan nuklir Korea Utara juga meningkat, dari kedua tabel tersebut peneliti berusaha menganalisis pola atau kecenderungan yang saling terkait dalam dua grafik tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan nuklir dari kedua negara tersebut sama-sama cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Setelah data-data di analisis, maka akan ada kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Dari data-data yang telah dikumpulkan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa Amerika Serikat ikut terlibat aktif dalam proses denuklirisasi Semenanjung Korea karena memiliki kepentingan untuk menjaga dominasi nya di Asia Timur dan dunia internasional. Hal tersebut dikarenakan Asia Timur sendiri di apit oleh beberapa negara *super power* seperti Amerika Serikat sendiri, Rusia, dan negara yang dipercaya menjadi kekuatan baru di Asia yaitu Tiongkok.

Untuk mempertahankan status quo mengenai eksistensi dan pengaruhnya di dunia internasional, maka Amerika Serikat harus ikut berperan dalam fenomena yang terjadi di lingkungan internasional, khususnya dalam penjagaan stabilitas sistem internasional. Amerika Serikat juga mengupayakan perjanjian damai antara Korea Selatan dan Korea Utara karena Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk membuat Korea Utara memusnahkan senjata nuklirnya, dengan begitu ancaman terhadap keamanan nasionalnya akan berkurang.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **Bab I           Pendahuluan**

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang diformulasikan ke dalam pertanyaan penelitian serta pengajuan hipotesa yang akan dibuktikan, dengan disertai kerangka pemikiran, model analisis dan operasionalisasi konsep.

### **Bab II           Nuklir Korea Utara dan Dinamika Politik Kawasan Asia Timur**

Bab ini akan menjelaskan mengenai Korea Utara dalam dinamika Politik Kawasan Asia Timur, khususnya hubungan Korea Utara dan Korea Selatan pasca terjadinya Perang Korea sampai pada tahun 2018 serta hubungan Korea Utara dengan Jepang dan Tiongkok. Bab ini juga akan menjelaskan pengaruh nuklir Korea Utara dengan politik internasional.

### **Bab III          Upaya Amerika Serikat dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara**

Bab ini akan menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam keterlibatannya untuk proses Denuklirisasi Semenanjung Korea, baik yang dilakukan secara koersif maupun diplomatis (pembicaraan bilateral dan mendukung reunifikasi Korea Utara-Korea Selatan)

### **Bab IV          Kepentingan Amerika Serikat dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara**

Bab ini membahas mengenai analisa penulis terkait posisi Amerika Serikat di system internasional dan kepentingannya Amerika Serikat

yang terus mengupayakan terciptanya denuklirisasi di Semenanjung Korea.

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian.

